

ABSTRAK

Optimalisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi Lampung dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Perpajakan di Indonesia

Oleh:

Dewingga Maharani Putri Utomo

Permasalahan pajak di Indonesia ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan banyaknya kasus penghindaran pajak serta kompleksitas administratif. Sistem identitas tunggal (*single identity number*) yang belum diterapkan menyebabkan duplikasi data dan proses verifikasi yang lambat. Langkah yang diambil pemerintah adalah melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 136/PMK.04/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, pemadanan secara resmi dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah optimalisasi pemadanan NIK menjadi NPWP di Provinsi Lampung dapat meningkatkan tertib administrasi perpajakan? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pemadanan NIK menjadi NPWP?. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan ini telah berjalan optimal di Provinsi Lampung dengan ditunjukkan data keberhasilan 97,58% per tahun 2024. Integrasi antara DJP dan Dukcapil terbukti menyederhanakan identifikasi wajib pajak, memperkuat validasi data, dan mempermudah proses pelaporan dan penagihan. Implementasi kebijakan pemadanan NIK ke dalam sistem NPWP menunjukkan dinamika antara faktor pendukung seperti kemajuan teknologi, sinergi antar lembaga, dan regulasi yang mendukung. Meskipun demikian, tantangan seperti integrasi data antar lembaga, rendahnya literasi digital, serta kurangnya sosialisasi masih menjadi hambatan. Saran yang dibutuhkan adalah pendekatan proaktif dari DJP dan peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Kata Kunci: Pajak, Pemadanan NIK-NPWP, *Single Identity Number*

ABSTRACT

Optimizing the Matching of Population Identification Number to Taxpayer Identification Number in Lampung Province in an Effort to Improve Orderly Tax Administration in Indonesia

By:

Dewingga Maharani Putri Utomo

The tax problem in Indonesia is the low level of taxpayer compliance and the many cases of tax evasion and administrative complexity. The single identity number system that has not yet been implemented causes duplication of data and a slow verification process. The step taken by the government is through the matching of the Population Identification Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP). In accordance with the provisions of Article 2 Paragraph (1a) of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and PMK Number 136 / PMK.04 / 2023 concerning amendments to PMK Number 112 / PMK.03 / 2022 concerning NPWP for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency Taxpayers, the matching is officially implemented. The formulation of the problems in this study are (1) How can the optimization of NIK matching into NPWP in Lampung Province improve the orderly tax administration? (2) What are the supporting and inhibiting factors in the application of NIK matching into NPWP?. This research uses empirical juridical method. The types of data used include literature study and field study. The data is analyzed using a qualitative descriptive approach.

The results showed that this matching policy has run optimally in Lampung Province as shown by the success data of 97.58% as of 2024. The integration between DJP and Dukcapil is proven to simplify taxpayer identification, strengthen data validation, and simplify the reporting and billing process. The implementation of the NIK matching policy into the NPWP system shows dynamics between supporting factors such as technological advances, synergy between institutions, and supporting regulations. However, challenges such as data integration between institutions, low digital literacy, and lack of massive socialization are still obstacles. Suggestions needed are a proactive approach from the DJP and increased education to the public to support the success of this policy.

Keywords: *Tax, NIK-NPWP Matching, Single Identity Number.*